



**Judul** : Kemenkop UKM-BPS Perbarui Data UMKM dan Koperasi  
**Tanggal** : Kamis, 10 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 10

## Kemenkop UKM-BPS Perbarui Data UMKM dan Koperasi

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,  
LIDA PUSPANINGTYAS

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menekankan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kerja sama penyediaan data informasi statistik koperasi dan UMKM. Pada 2024 mendatang, UMKM Indonesia diharapkan sudah masuk ke dalam satu data dan terintegrasi lintas sektor.

Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamankan pembangunan basis data tunggal paling lama dua tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut. Akan tetapi, khusus di bidang koperasi dan UMKM, pemerintah harus mengedepankan kaidah statistik yang tepat sehingga harus bekerja sama terlebih dahulu dengan BPS.

"Kemenkop sebagai wali data sudah mendapatkan dukungan BPS sebagai pembina data. Pada 2022 adalah penyusunan standarisasi, penyusunan kuesioner, sampai pelatihan," kata Teten dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkop UKM dan BPS tentang Penyediaan, Pemanfaatan Data, dan Informasi Statistik Bidang Koperasi dan UMKM pada Rabu (9/3).

Teten mengatakan, pemerintah saat ini mengantongi data pelaku UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65 juta pelaku usaha. Angka itu menjadi salah satu target pendataan ulang ke depan. Proses itu diharapkan dapat tuntas pada 2024.

Data UMKM, kata Teten, saat ini juga tersebar di setiap kementerian dan lembaga. Ke depannya, Kemenkop UKM sebagai wali data UMKM akan menginventarisasi data tersebut

menjadi satu kesatuan.

Selain itu, ditargetkan sebanyak 14,5 juta pelaku koperasi sektor nonpertanian agar dapat diselesaikan pendataannya. Menurut Teten, data koperasi maupun UMKM sangat dinamis karena banyak pelaku usaha yang tidak menetap.

"Nota kesepahaman ini kita harapkan dijadikan sebagai payung hukum untuk meningkatkan kerja sama dalam pemanfaatan data," kata dia.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pihaknya akan menjadi pembina data sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Pemenuhan prinsip-prinsip statistik akan menjadi sangat krusial karena data tersebut akan sangat dibutuhkan. "Saya berharap ini tidak hanya memberikan manfaat bagi BPS, tapi juga lembaga lain dan Indonesia," katanya.

Selain perbaikan data, Bank

Indonesia (BI) juga telah meluncurkan aplikasi terintegrasi untuk pembenahan data keuangan UMKM. Aplikasi yang diberi nama SIAPIK tersebut akan membantu UMKM membuat laporan keuangan sehingga bisa menjadi penilaian kredit bagi perbankan.

Deputi Gubernur BI Doni P Joeyono menyampaikan, selama ini terjadi informasi asimetrik antara UMKM dan perbankan. Ini membuat UMKM sulit dibiayai perbankan karena tidak punya penilaian kredit yang layak.

"Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dapat memudahkan UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan usaha dan secara otomatis dapat menghasilkan laporan keuangan secara digital," katanya.

Ia mendorong UMKM menggunakan aplikasi ini karena

hanya perlu mencatat segala transaksi keuangan. Penguatan literasi pencatatan keuangan UMKM ini merupakan salah satu dukungan BI guna mencapai porsi kredit perbankan kepada UMKM sebesar 30 persen pada 2024.

Hingga saat ini, kredit UMKM telah mencapai 20,6

persen dari total kredit perbankan.

Doni mengatakan, masih rendahnya penyaluran kredit pada UMKM salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan dan rendahnya literasi keuangan.

■ **edi**, ahmad ikri noor